

PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Hari Indrawan, Achmad Hidir, dan Harapan Tua R.F.S

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Competence, Work Environment and Service Quality. This research is motivated by street vendors who are around the traditional market of Pekanbaru Government without permission and the location is in a zone that is forbidden to sell. This study uses a qualitative descriptive research method approach. The data is obtained directly through interviews with informants, namely the head of the section on Order, Hygiene and Guidance for street vendors, street vendors, and the community. The results of this study indicate that, the program carried out in the guidance and structuring of street vendors, namely, direction and counseling, arrangement and market development. The implementation of PERDA No. 11 of 2001 concerning the guidance and arrangement of street vendors through these programs has not run optimally. Minimal and unsustainable coaching programs and market development that are not well considered so that a market has been built but is neglected because it is no longer used. There are several factors that become obstacles in the guidance and structuring of street vendors in Pekanbaru, namely, human resources, facilities and budgets that are not met, lack of supervision, economic factors, education, weak public awareness of rules, and urbanization factors.

Key words: implementation, development, arrangement, street vendors

Abstrak: Pembinaan, Penataan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana program apa saja yang dilakukan dalam pembinaan dan penataan PKL dan melihat bagaimana implementasi dari program pembinaan dan penataan PKL di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh langsung melalui wawancara dari *informan*, yaitu kepala seksi bidang Ketertiban, Kebersihan dan Pembinaan pedagang kaki lima, pedagang kaki lima, dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, program yang dilaksanakan dalam pembinaan dan penataan PKL yaitu, Pengarahan dan penyuluhan, Penataan dan Pembangunan Pasar. Implementasi dari PERDA No 11 Tahun 2001 tentang pembinaan dan penataan PKL melalui program-program tersebut belumlah berjalan dengan maksimal. Program pembinaan yang minim dan tidak berkelanjutan dan pembangunan pasar yang tidak dipertimbangkan dengan baik sehingga ada pasar yang sudah dibangun namun terbengkalai karena tidak lagi dipergunakan. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan dan penataan PKL di kota Pekanbaru yaitu, sumber daya manusia, sarana dan anggaran yang tidak terpenuhi, pengawasan yang kurang, faktor ekonomi, pendidikan, lemahnya kesadaran masyarakat akan aturan-aturan, dan faktor urbanisasi.

Kata kunci: Pembinaan, Penataan, Pedagang Kaki Lima

PENDAHULUAN

Persaingan di sektor perdagangan boleh dikatakan cukup kuat. Apalagi dengan *trend* munculnya Pusat Perbelanjaan seperti Mall atau Super Market yang tumbuh sangat pesat. Hal ini membuat pedagang kecil semakin kecil, mahalnya biaya kios di Pusat Perbelanjaan seperti Mall, serta Kios permanen atau semi-permanen, membuat pedagang hanya berdagang di kios kios kaki lima yang mereka buat di sembarang tempat.

Sebagai pedagang kecil mau tidak mau harus berdagang di kios kaki lima dengan tempat yang menurut mereka strategis untuk menawarkan barang dagangan mereka, dengan biaya pembuatan kios yang relative murah dan tanpa adanya system kontrak membuat pedagang kaki lima menjamur di Kota Pekanbaru Khususnya di Wilayah Kecamatan Tampan. Jumlah PKL di Kota Pekanbaru terus tumbuh tidak terkendali,

Jumlah PKL mencapai 11.835 Orang (Sumber: Dinas Pasar Kota Pekanbaru, tahun 2017). Para pedagang kaki lima ini tidak hanya berada di Pasar namun juga tumbuh subur di Pinggir jalan Kota Pekanbaru.

Dengan perkembangan pedagang kaki lima yang semakin banyak, Pemerintah Kota Pekanbaru kemudian merancang suatu aturan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, dimana pada Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima di tentukan Oleh Kepala Daerah dalam hal ini adalah kewenangan Walikota Pekanbaru. Kebijakan ini tentunya mempertimbangkan hal yang ditimbulkan oleh keberadaan Pedagang Kaki Lima tersebut. Misalnya factor social ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan tentunya tata ruang kota.

Dalam PERDA tersebut juga disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 meyebutkan bahwa dalam menjalankan usaha di tempat usaha harus mendapat izin tempat penggunaan tempat usaha. Izin tersebut di dapatkan dengan syarat mendaftarkan usaha dan tempat usaha kepada pemerintah. Namun pada saat ini pedagang kaki lima sangat banyak kita temui di tepi jalan, dan juga banyaknya pedagang kaki lima tersebut tidak mendapat izin namun tetap mendirikan usahanya,, dalam artian banyak pedagang kaki lima tersebut yang tidak mengindahkan adanya peraturan tersebut.

Pada konsep kewirausahaan, memang setiap individu berhak untuk membangun kewirausahaannya. Namun juga perlu ditekankan bahwa dalam membangun wirausaha harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Begitu juga dalam konsep perdagangan tentunya kita tidak boleh lepas dari ketentuan yang telah di tetapkan. Dengan cita-cita pemerintah untuk menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota Metropolitan Madani harusnya mampu mengatasi permasalahan yang muncul dari adanya Pedagang Kaki Lima tersebut.

Lalu apakah sepenuhnya masalah ini dibebankan oleh pedagang kaki lima?, jawabannya adalah tidak sepenuhnya kita menyalahkan pihak pedagang kaki lima, karena mereka merasa apa yang mereka lakukan tidak menyalahin peraturan yang berlaku. Dan juga tidak adanya lokasi yang mendukung untuk melakukan dagang bagi pedagang kaki lima, dengan mempertingbangkan aspek ekonomis bagi pedagang kaki lima yang rasanya mustahil untuk mengontrak ruko atau kios.

Pada sisi lain, jika pedagang kaki lima ini ditertibkan tentunya pemerintah bertanggung jawab atas kelangsungan dagang mereka kedepannya. Pemerintah harus menyiapkan lokasi yang strategis agar para pedagang kaki lima bisa terus menjajakan dagangan mereka untuk keberlangsungan ekonomi kehidupan. Relokasi tentunya dilakukan atas dasar musyawarah kepada pedagang kaki lima, agar tempat yang kemudian akan ditentukan bisa menjadi tujuan masyarakat untuk mengunjungi dagangan para pedagang kaki lima.

Van Meter dan Van Horn dalam (Winaro, Budi. 2007:146), mendefinisikan Implementasi kebijakan, sebagai "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan". Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan ketertaturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata (Badudu, Zein, 1995).

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan daerah bahwa dimaksud dengan pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka

peningkatan Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri. Menurut alisyah bana (2001) mengemukakan bahwa pembinaan sektor informal meliputi : “memperkenalkan dan membimbing dalam rangka mengembangkannya mereka, agar memiliki kepribadian, sikap dan tingkah laku yang seimbang, serasi dan utuh dalam rangka memberikan keterampilan, pengetahuan, teknologi, bantuan modal atau alat produksi sampai dengan kemampuan mengelola pemasaran, sesuai dengan bakat, kecenderungan atau keinginan serta kemampuan sebagai tambahan bekal, selanjutnya atas prakarsa sendiri mau dan mampu meningkatkan produktivitasnya, sehingga dapat duduk sejajar dengan tenaga-tenaga kerja sektor formal, dengan kehidupan dan kesejahteraan yang layak bagi kemanusiaan.

Menurut Yan Pieter Karafir (Soemitro, Styastie 2002), menyatakan bahwa “Pedagang Kaki Lima adalah pedagang kecil yang berjualan di suatu tempat umum seperti di tepi-tepi jalan, taman-taman kota, emper-emper toko, dan pasar-pasar tanpa izin dari pemerintah.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjabaran teori yang mendasarinya maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu, 1.) Bagaimana bentuk program pemerintah kota Pekanbaru dalam melakukan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima; 2.) Bagaimana Implementasi program pemerintah kota Pekanbaru dalam melakukan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima; 3.) Apa saja Faktor penghambat dalam melakukan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 1.) Mengetahui bentuk program pemerintah kota Pekanbaru dalam melakukan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima; 2.) Mengetahui lebih lanjut Implementasi program pemerintah kota Pekanbaru dalam melakukan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima; 3.) Mengetahui apa Faktor penghambat dalam melakukan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 1.) Mengetahui bentuk program pemerintah kota Pekanbaru dalam melakukan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima; 2.) Mengetahui lebih lanjut Implementasi program pemerintah kota Pekanbaru dalam melakukan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima; 3.) Mengetahui apa Faktor penghambat dalam melakukan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di beberapa lokasi yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan Pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penelitian ini penulis jadikan lokasi penelitian yaitu Pasar Agus Salim, Pasar Cik Puan, Pasar Higenis, dan Pasar Lima puluh. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang didapat langsung dari informan penelitian yaitu Bidang pasar, pedagang kaki lima dan masyarakat. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen tentang jumlah pasar dan pedagang kaki lima yang ada di pasar pemerintah kota Pekanbaru.

HASIL

Program Penataan dan Pembinaan

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak bidang pasar dan juga dari beberapa pedagang kaki lima sebagai narasumber penulis menganalisa bahwa, untuk pembinaan pedagang kaki lima program yang dijalankan oleh bidang pasar sangatlah minim. Pembinaan yang dilakukan berupa penyuluhan dan sosialisasi mengenai ketertiban, kebersihan, dan sosialisasi mengenai lokasi-lokasi yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Untuk program penataan yang dijalankan oleh pemerintah kota Pekanbaru yaitu berupa pembangunan pasar-pasar dan renovasi pasar-pasar yang bertujuan untuk menciptakan lokasi yang legal dan menyediakan tempat bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Hal ini untuk merelokasikan pedagang kaki lima

yang berada di lokasi yang tidak diperbolehkan.

Implementasi Program Pembinaan dan Penataan

Program pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru adalah dengan melakukan penyuluhan dan pengarahan mengenai ketertiban, kebersihan dan sosialisasi mengenai aturan-aturan yang berlaku mengenai lokasi yang diizinkan untuk melakukan perdagangan bagi pedagang kaki lima. Pada program pembinaan ini pemerintah kota Pekanbaru tidak melakukannya secara berkelanjutan dan terus menerus.

Program penataan adalah suatu kegiatan dalam rangka mengatur, menertibkan dan menempatkan pedagang kaki lima yang tepat dan sesuai dengan berbagai aspek pertimbangan. Sampai dengan saat ini penataan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pedagang kaki lima yang berada dipasar tradisional milik pemerintah adalah dengan melakukan pembangunan pasar sebagai bentuk penyediaan tempat bagi pedagang kaki lima agar tertata tempat dan terciptanya ketertiban.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak bidang pasar mengenai komunikasi diketahui bahwa bidang pasar sudah mensosialisasikan kepada pedagang kaki lima mengenai aturan-aturan yang berlaku tentang kawasan yang diizinkan oleh pemerintah untuk digunakan oleh pedagang kaki lima dengan batasan-batasan waktu yang telah ditentukan juga. Kemudian mengenai komunikasi antara pihak pelaksana kebijakan sudah dilakukan dengan baik, masing-masing pelaksana sudah mengerti dan paham mengenai tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Sementara masih banyak pedagang kaki lima tidak mengetahui kebijakan pembinaan dan penataan pedagang kaki lima tersebut. Sosialisasi yang didapat oleh pedagang kaki lima tersebut hanya berupa teknis dilapangan.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Bidang Pasar, sumber daya yang ada sudah terpenuhi. Dalam pelaksanaannya dilapangan bidang pasar memiliki UPTD di setiap pasar dan bidang pasar juga membentuk suatu *team* yang disebut Satuan Tugas (SATGAS) yang beranggotakan sebanyak 92 orang. SATGAS ini sendiri melakukan pengawasan setiap hari dipasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah kota Pekanbaru. Menurut analisa penulis, sumber daya manusia pada bidang pasar belum terpenuhi, karena dalam langkah pengambilan program tersebut terlihat masih sangat minim inovasi-inovasi kebijakan program yang diambil. Dibutuhkan sumber daya yang kreatif dalam menggali ide-ide dan inovasi baru dalam mengambil program mengatasi persoalan pedagang kaki lima tersebut.

Sikap Aparatur Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Bidang pasar dan PKL, diketahui bahwa sikap aparatur memang harus mampu memberikan kenyamanan bagi objek kebijakan. Yang dilakukan oleh bidang pasar adalah dengan pendekatan persuasif kepada pedagang kaki lima, sehingga pedagang kaki lima mau mengikuti himbauan-himbauan bidang pasar dan juga aturan-aturan yang ada. Jika pendekatan dilakukan dengan baik dan memberikan solusi bagi pedagang semua akan mengikuti aturan tersebut. Beberapa pedagang kaki lima mempersoalkan ketidaktepatan pemerintah dalam mengambil kebijakan di beberapa lokasi, dan juga pemerintah yang sedikit lamban dalam melakukan penataan dan pembinaan. Terlepas dari itu sikap aparat saat melakukan relokasi pedagang sudah dianggap baik oleh pedagang kaki lima tersebut.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafruddin diketahui bahwa, struktur pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian khususnya bidang pasar sudah dibuat dengan baik, dan semua struktur bekerja dengan baik sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya

masing-masing. Sehingga setiap elemen bisa bekerja dengan baik. Meskipun dibebepa sisi ada yang belum mencapai target, akan tetapi tetap akan bekerja lebih baik lagi kedepannya. Sehingga setiap target terutama dalam mengatasi persoalan pedagang kaki lima yang bisa mengambil contoh dari beberapa daerah yang mampu mengatasinya dengan baik. Diharapkan tentunya melalui struktur birorkrasi ini tercipta *Check and balanced* setiap bagian unit kerja pemerintah.

PEMBAHASAN

Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak bidang pasar dan juga pedagang kaki lima, program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah penulis nilai masih belum serius. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pembinaan yang tidak diadakan secara berkelanjutan dan merata kepada pedagang kaki lima. Sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang belum pernah mendapat pembinaan oleh pemerintah.

Padahal, pembinaan itu adalah sebuah kewajiban yang harusnya dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah kepada pedagang kaki lima. Karena pembinaan tersebut merupakan Peraturan Daerah yang harusnya dilaksanakan dan hak dari pedagang kaki lima untuk mendapatkan pembinaan. Tidak sebatas peraturan daerah, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Dan perwujudan dari hal tersebut ialah melalui pembinaan terhadap pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima adalah masyarakat yang berada pada kelas ekonomi bawah yang seharusnya pun menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk diambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Dalam halnya pembinaan, jika kita melihat apa saja yang menjadi program pemerintah kota Pekanbaru kepada pedagang kaki lima masih sangat minim dan belum akan berdampak pada peningkatan produktifitas pedagang kaki lima.

Kita lihat bahwa pedagang kaki lima yang berada di wilayah pasar pemerintah kota Pekanbaru terdiri dari beberapa macam pedagang yaitu, pedagang sayur, pedagang cabai, pedagang ikan dan pedagang pakaian dan makanan. Dari berbagai macam pedagang tersebut pemerintah selayaknya bisa mengambil program pembinaan berdasarkan jenis pedagang. Pemerintah bisa memberikan modal bagi pedagang atau menyalurkan pedagang kaki lima kepada pemilik modal dan membina mengenai pasar dan manajemen pasar agar pedagang bisa mengembangkan usahanya.

Kemudian program lain yang menurut penulis bisa diambil oleh pemerintah adalah dengan melakukan pelatihan keahlian bagi pedagang kaki lima. Sehingga dengan program tersebut maka pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan disekitaran pasar pemerintah bisa mengembangkan danganannya tidak hanya dilapak, juga bisa dijual melalui sarana dagangan lainnya semisal *online shopping*, jenis pedagang kaki lima yang bisa diikut sertakan dalam hal ini ialah pedagang pakian.

Khusus untuk pedagang kaki lima yang berjenis sayuran dan ikan, pemerintah bisa melihat apakah barang dagangan yang dijual oleh pedagang kaki lima adalah produksi sendiri atau mengambil dari agen. Jika produk sayuran dan ikan tersebut berasal dari produksi sendiri, maka pemerintah bisa bekerja sama dengan swasta pemilik pasar moderen untuk menyalurkan hasil produksi pedagang tersebut. Dengan demikian jika kerjasama tercapai dan hasil produksi tersebut menjadi pemasok utama kepada pasar moderen tersebut, pedagang kaki lima tidak harus membuka lapak untuk berjualan kepasar namun bisa fokus menjadi pemasok kepada pasar moderen tersebut dengan kemasan-kemasan yang pedagang tersebut sediakan.

Dengan demikian jika program tersebut dilakukan dengan serius dan berkelanjutan maka, kedepannya akan bisa dilihat hasil dari program tersebut. Jika dijalankan dengan serius dan berkelanjutan memungkinkan pemerintah untuk mengatasi persoalan pedagang kaki lima tersebut. Jika pelaksanaannya tidak

dilakukan secara berkelanjutan maka wajar jika pedagang kaki lima ini semakin bermunculan.

Penataan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis kemudian penulis menganalisa dan menyimpulkan bahwa, melihat program pemerintah dalam rangka penataan pedagang kaki lima hanya mengacu pada satu program yaitu program pembangunan pasar tradisional. Program pembangunan pasar tradisional di beberapa tempat dan kondisi memang menjadi alternatif bagi pedagang kaki lima yang berada di wilayah pasar pemerintah. Akan tetapi, seharusnya penataan pedagang kaki lima tidak hanya mengacu pada satu program saja. Masih banyak program lain yang inovatif dan bisa menjadi alternatif dalam mengatasi persoalan pedagang kaki lima tersebut.

Program yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima yaitu dengan mengadakan "event" yang melibatkan pedagang kaki lima tersebut seperti, Night market yang pernah dilakukan oleh pemerintah surakarta, kemudian penempatan pada saat *car free day*, atau dengan membuat pusat jajanan pekanbaru. *Event* akan menjadi daya tarik bagi pengunjung dan akan menguntungkan untuk pedagang kaki lima sebagai penjual. Bagi pedagang kaki lima dengan jenis ikan dan sayuran, melalui pembinaan yang dilakukan sebelumnya dapat menjajakan dagangannya dengan menggunakan kemasan. Hal tersebut dapat menaikkan harga jual bagi produk-produk yang dijual. Demikian kegiatan pembinaan harus sejalan dengan penataan.

Banyak program yang bisa menjadi rujukan pemerintah kota Pekanbaru dalam mengatasi persoalan pedagang kaki lima di pasar kota Pekanbaru. Dengan melihat dan mempelajari dari program dari berbagai daerah yang ada dengan persoalan yang sama. Tidak melulu dengan hanya terfokus pada satu program saja. Karena pembangunan pasar pun tidak mampu mengatasi persoalan pedagang kaki lima sebagaimana dijelaskan pada kasus diatas.

Program-program penataan memang tidak serta-merta berdampak langsung. Diperlukan waktu dan dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan hasil yang baik dalam mengatasi persoalan pedagang kaki lima tersebut. Program-program tersebut pun harus dijalankan secara berkelanjutan agar program berjalan dengan merata dan menyeluruh jangan sampai program tersebut terputus ditengah jalan, karena tidak akan menghasilkan apa-apa. Kemudian dalam pengambilan kebijakan mengenai program yang akan dilakukan dalam penataan pedagang kaki lima tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai pertimbangan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, penulis menganalisa bahwa ada dua faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi program pembinaan dan penataan pedagang kaki lima. Faktor pertama adalah faktor internal yaitu, faktor yang berasal dari pihak pelaksana program dalam hal ini bidang pasar. Faktor internal tersebut pada pembinaan pedagang kaki lima yaitu, program yang dijalankan belum maksimal, tidak dilaksanakannya secara berkelanjutan sehingga program pembinaan ini tidak berjalan maksimal dan belum berdampak positif bagi pedagang kaki lima. Dengan demikian kegiatan pembinaan dan pengarahannya tersebut harus secara rutin dan berkelanjutan dilaksanakan agar menghasilkan dampak yang positif bagi pedagang kaki lima.

Kemudian Penulis melihat ada faktor internal lain yang menjadi penghambat dalam melakukan pembinaan dan penataan pedagang kaki lima ini adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini bidang pasar. Lemahnya pengawasan ini kemudian menyebabkan munculnya pedagang-pedagang baru setelah pedagang kaki lima sebelumnya ditata, kemudian muncul pedagang kaki lima lain yang terkadang

berasal dari luar daerah Pekanbaru. Untuk itu perlu ditingkatkan pengawasan, jika perlu jalin kerja sama dengan instansi lain untuk membantu pengawasan tersebut.

Selain itu penulis melihat juga bahwa, belum terpenuhinya sumber daya. Baik itu sumber daya manusianya dan sumber daya anggarannya. Penulis mengatakan belum terpenuhinya sumber daya manusia tersebut didasarkan atas masih kurangnya ide-ide dan inovasi program yang muncul dalam melakukan pembinaan dan penataan pedagang kaki lima tersebut. Program yang ada saat ini belum berhasil menjawab permasalahan yang ada. Maka diperlukan sumber daya manusia yang baru yang visioner dan mampu mengembangkan ide-ide dan inovasi baru.

Sejalan dengan hal tersebut, sumber daya anggaran pun menjadi sangat penting, karena ketika pelaksanaan program tentunya diperlukan anggaran yang harus terpenuhi. Jika pemerintah menjadikan program pembinaan dan penataan tersebut menjadi fokus utama maka anggaran yang diperlukan harus dipenuhi melalui APBD. Jika anggaran terbatas, maka program akan dilaksanakan secara bertahap. Atau jika perlu pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan pemilik modal atau swasta dalam pengembangan dan pelaksanaan program pembinaan dan penataan pedagang kaki lima.

Selain faktor internal ada faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Adapun faktor eksternal tersebut yaitu faktor ekonomi, faktor ekonomi ini menjadi faktor utama munculnya pedagang kaki lima. Ekonomi yang lemah membuat masyarakat mengambil alternatif sebagai pedagang kaki lima untuk menjalankan roda kehidupan ekonomi. Untuk itu diperlukannya perluasan lapangan kerja dan bantuan modal agar bisa mengembangkan usahanya.

Faktor eksternal selanjutnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan pedagang kaki lima untuk mengikut kebijakan pemerintah. Peraturan-peraturan pemerintah mengenai lokasi yang tidak diperbolehkan berjualan sudah disosialisasikan dan masyarakat pada umumnya mengetahui akan hal

tersebut. Namun karena kurangnya kesadaran tersebut sehingga tetap melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan tersebut. Diperlukan ketegasan dalam kebijakan tersebut, jika diperlukan berikan sanksi kepada masyarakat dan pedagang kaki lima tersebut agar merasakan efek jera.

Faktor eksternal terakhir adalah urbanisasi, dengan status Pekanbaru sebagai Ibu kota provinsi Riau maka tidak diragukan lagi bahwa aktifitas ekonomi di kota Pekanbaru sangat tinggi. Hal tersebut digunakan oleh masyarakat untuk mencoba mengadu nasib di Perkotaan. Sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki keahlian khusus akan kewalahan menghadapi aktifitas perkotaan, dengan hal tersebut menyebabkan masyarakat tersebut mengambil alternatif menjadi PKL. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan peningkatan pendidikan dan pemerataan pendidikan diseluruh daerah, Melakukan pemerataan pembangunan dan penerapan program KB untuk memperlambat pertumbuhan penduduk.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembinaan dan penataan pedagang kaki lima penulis menyimpulkan bahwa Dalam melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, pemerintah Kota Pekanbaru menjalankan Program penataan dengan melakukan pembangunan pasar tradisional yang berguna untuk menampung pedagang kaki lima. Kemudian dalam hal program pembinaan pemerintah kota Pekanbaru sudah melakukan penyuluhan dan Bimbingan kepada Pedagang Kaki Lima.

Implementasi dari penataan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Pasar saar ini sudah dilakukan dengan melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional dan melakukan penyuluhan dan pengarahan terhadap pedagang kaki lima. Namun penulis melihat bahwa implementasi belum maksimal dilaksanakan oleh bidang pasar. Seperti program pembinaan yang tidak dilakukan dengan berkelanjutan. Sehingga dampak dari program pembinaan tersebut belum terlihat dengan jelas. Untuk penataan pemerintah su-

dah menjalankan beberapa pembangunan. Pada saat ini ada tiga pasar yang dibangun untuk menampung atau mengurai pedagang kaki lima tersebut, pasar tersebut yaitu Pasar Lima Puluh, Pasar Palapa dan Pasar Higenis. Pasar Lima Puluh memang menjadi solusi untuk mengurai pedagang kaki lima tersebut. Sementara pasar Higenis menjadi pasar yang terbengkalai saat ini karena pedagang kaki lima lebih memilih berada di bahu jalan dari pada berada dipasar Higenis tersebut karena ketika berjualan di pasar Higenis tersebut pengunjung sepi. Perlu pertimbangan yang teliti untuk melakukan pembangunan pasar tersebut. Jangan sampai setelah pasar dibangun namun tidak digunakan seperti halnya pasar higenis. Hal tersebut hanya akan menjadi sia-sia.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam impementasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima tersebut terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal yang menjadi hambatan adalah masih belum terpenuhinya sumber daya baik itu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, program-program yang dilakukan masih inkosisten dan tidak berkelanjutan, dan lemahnya pengawasan dari bidang pasar terhadap pedagang kaki lima tersebut. Adapun yang menjadi faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan juga pedagang kaki lima akan aturan yang ada dan juga faktor tingkat urbanisasi yang tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Alisyahbana. 2001. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis*. Bandung: Gelora Aksara Pratama.
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Muhammad. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soemitro, Styastie. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- Dinas Pasar Kota Pekanbaru, tahun 2017
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL